

**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PERADILAN  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**OLEH**

**AFIYAH WIJI RAHAYU**

**JURUSAN MU'AMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1422 H / 2001 M**

**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PERADILAN  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an  
(IIQ) Jakarta untuk memenuhi syarat-syarat  
mencapai Gelar Sarjana (S1) Syari'ah

Oleh:  
AFIYAH WIJI RAHAYU  
NIM: 9310080

Di bawah bimbingan:



Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH., MA

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1422 H / 2001 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah “INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA” pada tanggal 27 Agustus 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata I (S1) pada Jurusan Mu’amalah.

Jakarta, 27 Agustus 2001

Dekan



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota



(Drs. Maulana Hasanudin, M.Ag)



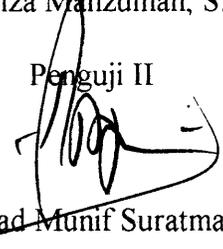
( Liza Mahzumah, S.Ag )

Penguji I

Penguji II



( Dr.H.A. Chaeruddin, SH )



(Dr. H. Ahmad Munif Suratma Putra, MA)

Pembimbing



(Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanyalah milik Allah, pemberi petunjuk, pencurah kasih dan sayang. Atas rahmat-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", sebagai kelengkapan dari persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Hosen, L.MI.
2. Ketua Yayasan IIQ, Ibu Hj. Harwini Yoesoef dan seluruh Keluarga Besar Yayasan IIQ.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an, Bapak Dr. Maulana Hasanuddin, M. Ag.
4. Bapak Pembimbing Skripsi, Bapak Prof. Dr. H. A. Sukardja, S. H. M.A.
5. Karyawan Perpustakaan Institut Ilmu Al Qur'an, Institut Agama Islam Negeri Jakarta dan Perpustakaan Iman Jama'.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda dan Ibunda.
7. Saudara-saurada saya, Kakanda dan Adinda, dan seluruh teman-teman yang telah memberikan perhatian dan motifasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semuanya, Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah berkenan menerima serta mencatat segala perbuatannya sebagai bagian dari amal yang baik.  
Amin.

Juni 2001  
Jakarta \_\_\_\_\_  
R. Akhir 1422

Penulis

## Daftar Isi

	. Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	2
C. Metode Pembahasan .....	2
D. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II : SEKILAS TENTANG ASAS PRADUGA TAK BERSALAH</b>	
A. Pengertian Asas dalam Penetapan Hukum .....	4
B. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah .....	6
C. Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah .....	12
<b>BAB III : ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SUATU PROSES MENUJU KEADILAN HUKUM</b>	
A. Maksud dan Tujuan Asas Praduga Tak Bersalah .....	17
B. Macam-macam Asas di dalam Hukum Acara Pidana.....	23
C. Mencari Rasa Keadilan Melalui Asas Praduga Tak Bersalah.....	37
<b>BAB IV: ASAS PRADUGA TAK BERSALAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Positif .....	47

B. Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Hukum Islam.....	53
C. Analisa Perbandingan .....	75
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	78
Daftar Pustaka.....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala hal ikhwal peradilan, mulai dari siapa-siapa yang mempunyai wewenang dalam memeriksa, menggeledah, menahan tersangka/terdakwa serta memberikan hukuman, melaksanakan putusan pengadilan, mulai dari banding, kasasi serta grasi.<sup>1</sup>

Hukum acara pidana tersebut ( KUHAP ) mempunyai beberapa asas yang dijadikan pedoman bagi jajaran aparat dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Diantara asas tersebut adalah praduga tak bersalah yaitu dianggapnya tersangka/terdakwa tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya di dalam pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas tersebut selama ini hanya berkisar di dalam lembaga pengadilan maupun pihak-pihak tertentu yang faham tentang hukum, namun dengan bergulirnya rezim orde baru dan semangat reformasi, asas tersebut mendapatkan warna lain karena asas tersebut sudah dikenal dan bahkan sudah membudaya di dalam masyarakat. Dan karena masyarakat Indonesia mayoritas ummat Islam, maka penulis akan mengupas

---

<sup>1</sup> R. Atang Ranoe Mihardja, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan antara Hukum Acara*

“Asas Praduga Tak Bersalah” tersebut menurut hukum positif, kemudian dibandingkan dengan hukum Islam.

### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Agar pembahasan pembahasan dalam skripsi tersebut terarah, maka penulis akan membatasi masalah-masalah tersebut dengan rumusan rumusan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh keberadaan asas praduga tak bersalah dalam mengantisipasi kedilan hukum.
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”.
4. Menganalisa kedua hukum tersebut terhadap “Asas Praduga Tak Bersalah”.

### **C. Metode Pembahasan**

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode Library Research ( penelitian kepustakaan ) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku: “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” yang dikeluarkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan buku “Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah” karangan Prof. Dr. S. Nasution, MA dan Prof. Dr. Thomas.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyajikannya dalam lima bab yang pada garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, yang didalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, kemudian disebutkan juga tentang Metode Pembahasan, diakhiri dengan Sistematika Penulisan

**BAB II** Sekilas tentang Asas Praduga Tak Bersalah, yang didalamnya membahas Pengertian Asas dalam Penetapan Hukum, dilanjutkan dengan Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah kemudian penulis tutup dengan uraian: Dasar Hukum Asas Praduga Tak Bersalah.

**BAB III** Membahas Asas Praduga Tak Bersalah suatu Proses Menuju Keadilan Hukum, yang meliputi; maksud dan tujuan Asas Praduga Tak Bersalah serta macam-macam asas dalam Hukum Acara Pidana, dan diakhiri dengan mencari rasa keadilan melalui Asas Praduga Tak Bersalah.

**BAB IV** Tinjauan Asas Praduga Tak Bersalah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam , di dalamnya membahas Asas Praduga Tak Bersalah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam , kemudian diakhiri dengan analisa perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap Asas Praduga Tak Bersalah.

**BAB V** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praduga tak bersalah dijadikan sebagai asas dalam hukum acara pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lain adalah dengan maksud bahwa tersangka/terdakwa belum dianggap bersalah, sebelum terbukti kesalahannya menurut hukum dan Undang-Undang.

Praduga tak bersalah merupakan gambaran sikap atau tindakan yang dapat mengantisipasi keadilan di dalam penegakan hukum karena di dalamnya telah dilindungi dan dihormati harkat serta martabat manusia yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Dengan diperhatikannya asas tersebut serta diwujudkan oleh aparat penegak hukum baik hakim maupun pejabat-pejabat yang lain, dalam melaksanakan proses peradilan akan tercipta suatu kebijakan yang searah dengan tujuan diciptakannya hukum acara pidana bagi bangsa Indonesia yaitu menyelaraskan tiga kepentingan:

1. Kepentingan umum yang mendalilkan pada petugas alat negara demi kelancaran kerjanya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat.

amanat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Illahi Rabbi yang merupakan hakim tunggal.

4. Perlu digalakkan program Kadarkum (keluarga sadar hukum) di desa-desa dan di kota-kota sehingga setiap individu dalam keluarga mengetahui tentang kedudukan dirinya di depan hukum. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut bila dihadapkan di muka pengadilan. Tentunya sadar hukum ini dimulai dari diri pribadi para penegak hukum, yang kita kenal dengan "*da'wah bi al-hal*" (konsep Islam). Sehingga para penegak hukum tersebut cukup konsisten dengan aturan-aturan yang ada. Dan tidak perlu lagi gembar-gembor "sadar hukum."
5. Dengan semangat reformasi, hendaknya hukum lebih diperhatikan baik oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, khususnya Hukum Acara Pidana adalah rumusan-rumusan indah yang akan berarti apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang akhirnya akan tercipta *Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur*.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Abdurrahman Ibrahim. 1989. *Al Qadha wa Nidhamuhu fi Al Kitab wa Al Sunnah*. Cet. Ke-1. Makkah: Syirkah Makkah Al Mukarramah.
- Ahmad, Amrullah. (Eds. ). Tanpa Tahun. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annisaaburi, Ibn Al Husain Al Hujjaj Al Faqiri. 1993. *Shahih Muslim*. cet. ke-2. TT: Dar Al Fikr.
- An- Nadwi, Ali Ahmad. 1986. *Al Qawaid Al Fikhiah*. Cet. Ke-1. Damsyiq: Dar Al Qalam.
- Asa, Syu'bah. 2000. *Dalam Cahaya Al Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*. Cet. ke-1. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 1982. *Fakta Keagungan Syariat Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bakr, Bahrin Abu. 1995. *Terjemahan Tafsir jalalain berikut Asbabun Nuzl*. Jilid IV. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Sinar Baru Al Gensindo.
- Budiarto, M.K. Wantjik. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Dahlan, Abdul Aziz. (ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-1. Balai Pustaka.
- Djamil, Fathur Rahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Logos Wacana.
- Hakim, M. Luqman. 1993. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Cet. Ke-1. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hanafi, Ahmad. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Harahap, M. yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Saptha Artha Jaya.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 1998. *Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia*. Cet. Ke-1. Jakarta: El Sam
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Tafsir Al Qur'an bil Ilmi dan Hak-hak Asasi Manusia*. Cet. Ke-1. Jogjakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Luqman, Loebbi. 1987. *Pra Peradilan di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Sughrwardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Muslehuddin. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jogjakarta: PT. Tiara Wacana.
- Naning, Ramdhan. 1993. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Liberti.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Beberapa Pelaksanaan KUHAP*. Jogjakarta: PT. Liberti.
- , 1982. *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*. Jogjakarta: PT. Liberti.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Bandung: Alumni.
- Sabiq, Al Sayyid. 1983. *Fikh Al Sunnah*. Jilid III. Baeirut: Dar. Al Fikr. Yahya, Muhtar dan Fathur Rahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikh Islam*. Cet. Ke-1. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Siregar, Bismar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.

- Sukardja, Ahmad. 1994. *Al Qur'an dan Tiga Kategori Hukum dalam Islam* " dalam *Majalah Ilmiah dan Keagamaan Media Al Furqan*. No. 5. Tahun III. September-November. Jakarta: Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta.
- Syah, Nadzir. 1997. " *Peranan Masyarakat dalam Aplikasi Maqasid Asy-Ayariah*". *Dalam Jurnal Wardah*. Edisi ke-2. Jakarta: Fosmas IIQ Jakarta.